



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling terbesar di Indonesia. Sebagai sumber penerimaan yang paling utama, pajak memegang peran yang sangat penting dalam neraca keuangan pemerintah. Pajak bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana umum, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Mengingat begitu pentingnya peran pajak, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan.

Pajak memiliki perubahan jumlah penerimaan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 1,4% dari penerimaan pajak tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp 1.577,6 Triliun atau hanya 86% dari target APBN pada tahun 2019 sebesar Rp 1.784,6 Triliun (DJP 2019). Penerimaan pajak berasal dari masyarakat dan bersifat memaksa. Masyarakat memiliki peran dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak. Namun, masih terdapat masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya membayar pajak yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti hasil pemungutan pajak tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak, serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan.

Pajak memiliki perkembangan dari tahun ke tahun. Dalam perkembangannya, Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pajak tidak langsung contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika dilihat dari fleksibilitas peningkatan penerimaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut disebabkan karena tidak semua orang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi yang telah berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada setiap jalur rantai distribusi dan produksi barang maupun jasa serta dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lain. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda.

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri telekomunikasi yang memiliki aktivitas penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang akan memiliki pajak masukan dan pajak keluaran. Barang kena pajak dan jasa kena pajak yang telah diterima oleh konsumen akan memiliki nilai pada pajak keluaran bagi perusahaan penjual, yaitu PT XYZ. Sedangkan barang kena pajak yang diberikan oleh pembeli akan memiliki nilai pada pajak masukan atas transaksi perolehan barang kena pajak tersebut. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, PT XYZ meminta bantuan kepada Sukas Consulting dimana penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ di Sukas *Consulting*”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan laporan akhir ini ialah :

1. Bagaimana proses bisnis PT XYZ dan rencana kerja Sukas *Consulting*?
2. Bagaimana proses perhitungan PPN PT XYZ?
3. Bagaimana proses penyetoran dan pelaporan PPN PT XYZ?
4. Bagaimana proses ekualisasi PPN PT XYZ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini ialah:

1. Menguraikan proses bisnis PT XYZ dan rencana kerja Sukas *Consulting*.
2. Menguraikan proses perhitungan PPN PT XYZ.
3. Menguraikan proses penyetoran dan pelaporan PPN PT XYZ.
4. Menguraikan proses ekualisasi PPN PT XYZ.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis ini diperuntukkan bagi masyarakat untuk mengetahui fungsi dan tugas Kantor Konsultan Pajak. Selain itu, masyarakat dapat menambah pengetahuan mengenai tata cara perpajakan dan bagaimana proses terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pada perusahaan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai.
2. Manfaat Praktis ini diperuntukkan bagi Penulis, Sekolah Vokasi IPB, dan Sukas *Consulting*.
 - a. Penulis
Penulis diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta mendapatkan tambahan pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan. Selain itu, penulis memperoleh ilmu dan pengalaman baru.
 - b. Sekolah Vokasi IPB
Penulisan laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi/acuan penelitian bagi penulis selanjutnya, kemudian dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi, khususnya bagi mahasiswa/i Sekolah Vokasi Program Keahlian Akuntansi.
 - c. Sukas *Consulting*
Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan perbaikan bagi Sukas *Consulting* agar dapat memaksimalkan pelayanan serta kinerja staff agar dapat menjadi lebih baik lagi dalam membantu klien untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

